



## SIARAN PERS

Otorita Ibu Kota Nusantara

3 Oktober 2023

## Rapat Paripurna DPR RI Resmi Sahkan RUU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara

**JAKARTA** – Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada hari ini, Selasa (03/10/2023) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta.

“Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diikuti persetujuan peserta Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam pembicaraan tingkat II tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, RUU Perubahan UU IKN akan menjadi dasar hukum untuk mendorong proses 4P IKN.

“RUU Perubahan Undang-Undang IKN mampu menjadi landasan hukum dalam akselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” ujar Suharso.

Suharso melanjutkan, dalam rangka membangun IKN sebagai kota masa depan, maka diperlukan pengaturan yang berbeda dengan penguatan beberapa kekhususan kewenangan yang dimandatkan kepada Otorita IKN.

“Termasuk pengecualian dari pengaturan dalam regulasi sektoral (*lex specialis*). Penguatan kewenangan khusus dan pengaturan yang bersifat *lex specialis* dimaksudkan guna mendaya mampukan Otorita IKN untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, bahwa perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

“Optimalisasi itu akhirnya bermuara pada tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara,” ujar Doli.



NUSANTARA

# SIARAN PERS

**Catatan:**

***Kutipan dokumentasi foto dan keterangan kegiatan di bagian bawah Siaran Pers.***

**Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara**

Narahubung: Sekretariat OIKN  
(+62) 811-8115-8888

Website : [ikn.go.id](http://ikn.go.id)  
Instagram : [instagram.com/ikn\\_id](https://www.instagram.com/ikn_id)  
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)  
Twitter : [twitter.com/ikn\\_id](https://twitter.com/ikn_id)  
Youtube : [IKN Indonesia](https://www.youtube.com/IKN Indonesia)

#KotaDuniauntukSemua  
#Nusantara  
#IbuKotaNegara

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.



NUSANTARA

# SIARAN PERS

**DOKUMENTASI FOTO**  
**Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara**



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (03/10/2023)



NUSANTARA

# SIARAN PERS



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (03/10/2023)

